PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp (0271) 891068 Sragen 57215
Website http://www.rsspsragen.com dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG DIAGNOSTIK TAHAP 2 (RUANG CATHLAB)
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

TAHUN ANGGARAN
2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN GEDUNG DIAGNOSTIK TAHAP 2 (RUANG CATHLAB)
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Provinsi Jawa Tengah, akan dilaksanakan pembenahan baik dari aspek mutu pelayanan maupun dari aspek fasilitas pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pembangunan Gedung Diagnostik Tahap 2 (Ruang Cathlab) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Cathlab (Kateterisasi Jantung) sangat penting sebagai pusat layanan medis canggih untuk diagnosis dan tindakan intervensi minimal invasif pada jantung dan pembuluh darah. Prosedur ini memungkinkan penanganan cepat seperti pemasangan ring (stent), angiografi, dan penanganan aritmia tanpa bedah terbuka, mengurangi risiko, serta mempercepat pemulihan pasien

Dengan adanya Ruang Cathlab ini diharapkan dapat menunjang pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mempunyai visi "Menjadi Pilihan Utama Masyarakat dalam Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan" dengan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan;
2. Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, didukung sumber daya manusia yang profesional serta ramah lingkungan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai;
4. Meningkatkan kemitraan dengan institusi Pendidikan dan pihak terkait.

Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi kriteria teknis bangunan dan lingkungan yang layak dari segi mutu, biaya, waktu dan kriteria administrasi bagi bangunan negara dan bangunan kesehatan.
Secara kontraktual dalam kegiatan operasionalnya Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa Konstruksi

dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dan Dokumen Perencanaan yang ada.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, petunjuk dan pedoman bagi Penyedia Jasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dengan tujuan agar Pembangunan Ruang Cathlab yang dilaksanakan dapat memenuhi ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku.

3. Sasaran

Sasaran pekerjaan ini adalah terwujudnya Ruang Cathlab yang memenuhi ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku.

4. Lokasi Kegiatan

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Jalan Raya Sukowati No. 534 Sragen

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
- BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun Anggaran 2026 dan
- DAK Fisik Tahun Anggaran 2026

Nilai paket sejumlah Rp. 8.387.671.000,- terdiri dari :

Pagu Dana BLUD	: Rp. 6.000.000.000,-
HPS BLUD	: Rp. 5.957.994.000,-
Pagu Dana DAK Fisik	: Rp. 2.387.671.000,-
HPS DAK Fisik	: Rp. 2.373.812.000,-

Masing-masing pekerjaan tidak boleh melebihi harga HPS

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
dr. EDY SUTIKNO
NIP. 19791128 201001 1 012
Satuan Kerja:
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Adalah data-data awal yang menjadi acuan dan pedoman kerja dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi seperti : Spesifikasi Teknis, Gambar Perencanaan, dan Bill of Quantity.

8. Standar Teknis

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Arsitek.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.

B. Peraturan Pengganti Undang-Undang

1. Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

D. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri PU Nomor 66/PRT/1993
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung,
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan,
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung,
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung,
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum,
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan

Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2014/PRT/M/2014 Tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya,
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja,
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik,
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan P
23. erumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator,
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung,
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum,
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,
30. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara dan Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
34. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi.
38. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan.
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan.
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung.
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pendataan Bangunan Gedung.
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas
49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

F. Peraturan Kepala/Lembaga

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
2. Pedoman Laboratorium Katerisasi jantung dan Pembuluh Darah 2018

G. Keputusan Menteri/Surat Edaran Menteri/Instruksi Menteri

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Pengadaan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. SE Dirjen Bina Konstruksi No.182/SE/Dk/2025 Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara

H. Pedoman

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/46829/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Jantung Dan Pembuluh Darah

I. SNI terkait

RUANG LINGKUP

9. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Diagnostik Tahap 2 (Ruang Cathlab) ini adalah :

a. Sumber Dana BLUD Tahun Anggaran 2026
- Pekerjaan Persiapan
- Penerapan SMKK
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plambing

b. Sumber Dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2026
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plambing

10. Keluaran

Bangunan Ruang Cathlab yang memenuhi ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku.

11. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan

Persyaratan kualifikasi:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Perijinan di bidang Jasa Konstruksi;

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 41015 yang masih berlaku;

4. Memiliki KSWP Valid;

5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7. Pengalaman Perusahaan :

   Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
   SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan;

9. Dalam hal peserta melakukan KSO:
   a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 5, 6 dan 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
   b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.

12. Persyaratan Teknis Penyedia Jasa

1. Memiliki Kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Mobile Crane	Minimal 5 ton	1 unit
2.	Dump truck		3 unit
3.	Genset	Minimal 25 kVA	1 unit
4.	Total Station	-	1 unit

Keterangan :
Untuk kepemilikan : Milik Sendiri/Sewa/Sewa Beli

2. Memiliki Kemampuan menyediakan personil manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana	2 Tahun	Minimal Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya (Jenjang 5)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi		Memiliki Sertifikat Pelatihan K3 Konstruksi/SKK K3 Konstruksi

3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) :
Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini di bawah ini:

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (SKENARIO BAHAYA)
1	Pekerjaan Beton	Mata terkena cipratan beton
2	Pekerjaan Pembesian	Luka tergores
3	Pekerjaan Bekesting	Memar terkena palu
4	**Pekerjaan Pasangan Bata Ringan**	**Luka kejatuhan bata**
5	Pekerjaan Plesteran	Mata terkena cipratan plesteran
6	Pekerjaan Acian	Mata terkena cipratan acian

7	Pasang granit tile polished	Luka tergores granit
8	Pasang keramik lantai matt	Luka tergores keramik
9	Pasang keramik dinding glossy	Luka kejatuhan keramik dinding
10	Pasang pintu	Luka terjepit pintu
11	Pasang jendela	Luka terjepit jendela
12	Pasang rangka plafond	Luka tergores ujung rangka

13	Pasang penutup plafond	Luka kejatuhan plafond
14	Pasang kaca	Luka tergores kaca
15	Pengecatan dinding	Mata terkena cipratan cat
16	Pengecatan plafond	Mata terkena cipratan cat
17	Pasang Closet Duduk	Luka terjepit closet
18	Pasang Wastafel	Luka terjepit wastafel
19	Pasang Kaca Cermin	Luka tergores kaca
20	Instalasi kabel	Luka tergores kabel
21	Pasang kabel tray	Luka tergores tray
22	Pasang lift	Luka terjepit sangkar lift
23	Pemasangan dumb waiter	Luka terjepit dumb waiter
24	Pemasangan AC	Luka terjepit unit AC
25	Instalasi pipa	Luka tergores pipa

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sebagaimana tertulis di dalam SPMK.

14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Pekerjaan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	
A.	**BLUD TA 2026**								
1	Pek. Persiapan								
2	Penerapan SMKK								
3	Pek. Struktur								
4	Pek. Arsitektur								
5	Pek. MEP								
B.	**DAK FISIK TA 2026**								
1	Pek. Arsitektur								
2	Pek. MEP								

15. Surat Dukungan

Surat Dukungan yang diperlukan :

1. Surat Dukungan ReadyMix dari BatchingPlan dengan melampirkan :
   - Scan/foto Bukti Kepemilikan Batching Plan (milik sendiri/sewa/sewa beli) berupa invoice/bukti pembelian/nota pembelian disertai foto peralatan;
   - Scan/foto Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha kode KBLI 23957 Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;
   - Scan/foto Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi jenis mesin perkakas dan mesin produksi dari instansi berwenang;
   - Scan/foto Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan industri beton ready mix dari instansi berwenang;
   - Scan/foto Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dari instansi berwenang;
   - Scan/foto Bukti Kepemilikan Concrete Pump Truck dengan melampirkan STNK/BPKB/Invoice/Bukti Pembelian dan Uji Kendaraan Bermotor (keur/kir) yang masih berlaku dari instansi berwenang serta foto Concrete Pump Truck yang bersangkutan;
   - Scan/foto Bukti Kepemilikan Truck Mixer dengan melampirkan STNK/BPKB/Invoice/Bukti Pembelian dan Uji Kendaraan Bermotor (keur/kir) yang masih berlaku dari instansi berwenang serta foto Truck Mixer yang bersangkutan.
2. Surat dukungan AC dari Principal/Distributor Resmi yang berisi :
   - Jaminan garansi Sparepart 1 Tahun dan Kompresor 3 Tahun;
   - jaminan ketersediaan AC yang sesuai spesifikasi dan dalam kondisi baik, 100% baru dari pabrikan dan tidak cacat mutu;
   - Jaminan purna jual (after sale) berupa ketersediaan sparepart AC selama 10 (sepuluh) tahun;
   - Pernyataan akan menyampaikan dokumen COO (Certificate Of Origin) pada saat pengiriman barang.

   Dengan Melampirkan :
   - Brosur material yang distempel oleh Principal/Distributor resmi;
   - Scan/foto Sertifikat Produk VRV (*Variable Refrigerant Volume*)/VRF (*Variable Refrigerant Flow)*;
   - Scan/foto Sertifikat Badan Usaha IN008 Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara dengan KBLI 43224 yang masih berlaku.
   - Scan/Foto Surat Penunjukan / Sertifikat sebagai Distributor Resmi/Authorized Dealer dari Principal;
3. Surat Dukungan Elevator dari Principal/Distributor resmi yang berisi:
   - Jaminan garansi sparepart 1 Tahun dan garansi mesin 10 tahun;
   - Sanggup memberikan training pengoperasian untuk petugas yang ditunjuk;
   - Jaminan ketersediaan Elevator yang sesuai spesifikasi dan dalam kondisi baik, 100% baru dari pabrikan dan tidak cacat mutu;
   - Pernyataan akan menyampaikan dokumen COO (Certificate Of Origin) pada saat pengiriman barang.
   - Jaminan ketersediaan spare part 20 tahun;

- Free maintenance selama 1 tahun ;

Dengan melampirkan :

- Brosur material yang distempel;
- Scan/Foto Surat Penunjukan / sertifikat sebagai Distributor Resmi/Authorized Dealer dari Principal;

4. Surat Dukungan Dumbwaiter dari Principal/Distributor resmi yang berisi:
   - Jaminan garansi sparepart 1 Tahun dan garansi mesin 10 tahun;
   - Memberikan training pengoperasian untuk petugas yang ditunjuk;
   - Free maintenance selama 1 tahun ;
   - Jaminan ketersediaan spare part 20 tahun;
   - Jaminan ketersediaan Dumbwaiter yang sesuai spesifikasi dan dalam kondisi baik, 100% baru dari pabrikan dan tidak cacat mutu;
   - Pernyataan akan menyampaikan dokumen COO (Certificate Of Origin) pada saat pengiriman barang.

   Dengan melampirkan :
   - Scan/Foto Surat Penunjukan / sertifikat sebagai Distributor Resmi/Authorized Dealer dari Principal;
   - Brosur material yang distempel;

Sragen, 28 April 2026

Disusun Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
DINAS KESEHATAN

dr. EDY SUTIKNO

NIP 19791128 201001 1 012